



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Ketua Rapat	: <b>Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabagset. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 (dua puluh delapan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah C. Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu D. Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogoga

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Komisi II DPR RI dengan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, dan Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogoga, dengan Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), hari Selasa, 12 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN RAPAT

1. Terkait untuk melaporkan proses pelaksanaan Provinsi Papua Tengah yang sudah mendapat dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo, Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, menyampaikan hal sebagai berikut:
  - a. Memohon kepada Komisi II DPR RI untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar mengeluarkan Impres dalam rangka menghidupkan kembali Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah sudah memiliki undang-undang tersendiri yaitu UU No. 45 Tahun 1999.
  - b. Mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar Kabupaten Biak menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah, karena Kabupaten Biak sudah memiliki 3 jenderal TNI dan sudah memiliki bandara internasional dan pelabuhan laut yang memenuhi syarat.
  - c. Menyerahkan kepada Komisi II DPR RI dokumen-dokumen terkait usulan DOB Provinsi Papua Tengah.
  
2. Terkait penomoran Perdasus tentang Partai Lokal, Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, menyampaikan hal sebagai berikut:
  - a. Memohon kepada Komisi II DPR RI untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar menerbitkan Impres atau PP terkait Partai Lokal Papua Bersatu sebagai peserta pemilu tahun 2019. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjamin hak-hak politik orang Papua asli dan keberadaan partai lokal tetap ada di Provinsi Papua.
  - b. Memohon kepada Komisi II DPR RI untuk memberikan kursi otonomi khusus kepada partai lokal papua bersatu.
  - c. Menyerahkan kepada Komisi II DPR RI dokumen-dokumen terkait Partai Lokal Papua Bersatu.
  
3. Terkait pembentukan Calon DOB Kabupaten Bogoga Ibu Kota Bokondini pecahan dari Kabupaten Induk Tolikara, Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogoga, menyampaikan hal, yaitu Mendorong Komisi II DPR RI untuk membuka moratorium pemekaran daerah.

4. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disampaikan oleh Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, dan Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogog. Setelah mendengarkan masukan terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas masukan tersebut sebagai bahan dalam rapat intern Komisi II DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

**Jakarta, 12 November 2019**  
**KETUA RAPAT**



**ARIF WIBOWO**  
**A-210**